



▶ BANTUAN SOSIAL

# Bansos Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih

JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bantuan sosial (bansos) di desa akan disalurkan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Rika Anggraeni  
redaksi@jibinews.co

Zulhas menuturkan penyaluran bansos lewat Kopdes Merah Putih itu akan menggandeng salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pos Indonesia (Persero). Namun, dia tidak memberikan informasi lebih rinci bakal seperti apa skema penyaluran bansos yang nantinya diterapkan. "Kami ingin menjadi penyalur bantuan-bantuan sosial dengan PT Pos, [itu] BUMN juga. Jadi memang hampir semua [dengan BUMN]," kata Zulhas sesuai rapat Pembahasan Peran BUMN dalam Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/5).

Di samping menjadi penyalur bansos, sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, Zulhas menyebut keberadaan 80.000 Kopdes Merah Putih juga akan menjadi penyalur agen pupuk hingga agen gas LPG/BBM bersubsidi dengan menggandeng BUMN. Nantinya, permodalan Kopdes Merah Putih akan diberikan plafon pinjaman senilai Rp3 miliar dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan Kopdes Merah Putih itu menjelaskan Kopdes Merah Putih juga akan menjadi agen sembilan bahan pokok (sembako), seperti minyak goreng hingga gula. Pasokan kebutuhan sembako di

▶ Penyaluran bansos lewat Kopdes Merah Putih itu akan menggandeng salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Pos Indonesia (Persero).

▶ Apindo menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

KopDes ini akan berkoordinasi dengan Perum Bulog dan ID Food agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

Zulhas menambahkan sistem Kopdes Merah Putih turut akan dibantu oleh PT Telkom Indonesia. Menurutnya, keterlibatan BUMN menjadi kunci kesuksesan terhadap 80.000 KopDes Merah Putih. "Ini perlu dibangun sistemnya dari Pak Ririe [Ririek Adriansyah, Direktur Utama PT Telkom Indonesia] ini gimana bantu kita. COO lah yang atur, Pak Dony [COO Danantara Dony Oskaria]. Sehingga di koperasi tidak ada uang tunai kecuali untuk operasional harian," imbuhnya.

Terlebih, Zulhas menyatakan Kepala Negara RI meminta agar Kopdes Merah Putih ini harus berjalan sukses, sehingga diperlukan kerja sama dengan BUMN. "Karena perintah Bapak Presiden kali ini koperasi tidak boleh tidak sukses, harus sukses. Oleh karena itu kelahirannya dibidani dulu sampai kuat, dibimbing. Dan semua itu rupanya setelah saya pelajari, semua itu urusannya dengan BUMN," tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan pihaknya akan kembali mengadakan rapat evaluasi bulan depan, yakni pada Juni

mendatang. Hal ini mengingat musyawarah desa khusus (musdesus) rampung pada akhir Mei ini. "Tanggal 30 Juni pendaftaran sudah selesai, 12 Juli launching seluruh KopDes, [dan] 28 Oktober nanti akan launching fisiknya," ujarnya.

## Antisipasi

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himbara. Ajib menjelaskan sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan UU No.21/2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa *character, capacity, capital, collateral dan condition* (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih. "Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan," ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5).

Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

"Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman *online* [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini," tuturnya. (JIBI/Bisnis.com)